

Lampiran I
Status Penanganan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di berbagai Provinsi

Provinsi	Kegiatan Penataan Ruang dan Regulasi yang Telah Dilakukan	Rencana Tindak (2005-2006) Penataan Ruang
Kalimantan Timur	Rakeppres Rencana Tata Ruang (Kasaba) Rencana Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Program Strategis Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Percepatan legalitas dan penyesuaian untuk rencana-rencana dibawahnya
Kalimantan Barat	Rakeppres Rencana Tata Ruang (Kasaba) Rencana Kegiatan dan Rencana Pendanaan Konsep Pusat-pusat Pertumbuhan	Percepatan legalitas dan penyesuaian untuk rencana-rencana dibawahnya
Sulawesi Utara	Meningkatkan status dari <i>border crossing agreement</i> menjadi <i>border trade agreement</i> Pembicaraan di tingkat regional untuk kerjasama di bidang perikanan (Sangihe Talaud dengan Filipina Selatan) Batas ruang belum ada Rencana tata ruang belum selesai	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan
Maluku	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang menampung Rencana Tata Ruang Perbatasan Kawasan perbatasan tidak berpenduduk Penyusunan profil P. Ewu yang berbatasan dengan Timor Leste Pengawasan perairan (pengawasan batas dan pengawasan <i>illegal fishing</i>) yang memerlukan dana cukup besar yang dibiayai oleh APBD	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan
Riau dan Kep. Riau	Rakeppres Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di Riau dan Kep. Riau Kab. Dumai, P. Karimun, P. Rupat, P. Jemur, Batam, Pangkal Pinang, Lingga, Natuna	Percepatan legalitas dan penyesuaian untuk rencana-rencana dibawahnya
Papua	Rakeppres Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Penataan batas wilayah	Percepatan legalitas dan penyesuaian untuk rencana-rencana dibawahnya

Provinsi	Kegiatan Penataan Ruang dan Regulasi yang Telah Dilakukan	Rencana Tindak (2005-2006) Penataan Ruang
NAD	Belum ada RTR Kawasan Perbatasan Penyelundupan senjata Pelarian separatis ke Malaysia RTRWP yang menampung RTR Perbatasan Pengawasan perairan perlu diperketat untuk mencegah illegal fishing dan penyelundupan senjata	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan
Maluku Utara	Masalah yang paling sulit diselesaikan adalah di laut: P. Morotai yang berbatasan dengan Filipina akan ditetapkan sebagai kawasan pertahanan di perbatasan	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan
Bangka Belitung		
Irian Jaya Barat	Belum memiliki RTRWP Belum memiliki RTR Kawasan Perbatasan (Kab. Raja Ampat dengan Palau)	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan
NTT	RTRWP sudah ada Renstra sudah ada Draft Rakeppres akan dibahas pada tanggal 30-31 Maret 2005 Rencana Aksi telah dipresentasikan pada Tahun 2002 Mengusulkan 2 pusat pengamanan di Sekitar L. Sawu (tidak ada patroli wilayah); L. Timor yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia (pos angkatan laut); P. Batek tidak ada pengendalian pengawasan di pulau tersebut Yang dibutuhkan adalah pembedayaan ekonomi masyarakat	Percepatan legalitas dan penyesuaian rencana-rencana dibawahnya